

PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Putu Maha Iswari Putri Cantika¹, Ari Metalin Ika Puspita², Olivia Rika Sabela³, Revalina Annisa Firdausy⁴, Dian Andini Putri Prasasti⁵
putu.23025@mhs.unesa.ac.id¹, aripuspita@unesa.ac.id², olivia.23019@mhs.unesa.ac.id³,
revalina.23029@mhs.unesa.ac.id⁴, dian.23032@mhs.unesa.ac.id⁵
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Kehidupan bernegara dan bernegara di era digital membawa berbagai tantangan dan peluang baru. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung dalam penyampaian keinginan atau aspirasi masyarakat secara lebih luas dan transparan. Namun, maraknya berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial dapat menimbulkan polarisasi dan mengancam persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemberantasan korupsi di era digital serta peluang dan tantangan yang akan dilakukan dalam menindaklanjutinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di era digital serta dampak yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah literatur review terhadap beberapa artikel yang termuat dalam berbagai informasi melalui internet dengan kata kunci pencarian artikel pemberantasan korupsi di era digital, serta tantangan dan peluang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dari orang lain yang tersedia dalam bentuk literatur. Pada era digital ini membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pemberantasan korupsi. Teknologi digital memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk pemberantasan korupsi, namun hal tersebut juga menghadirkan tantangan baru yang harus diatasi.

Kata Kunci: Korupsi, Pemberantasan, Era Digital, Tantangan Dan Peluang.

ABSTRACT

State and national life in the digital era brings various new challenges and opportunities. On the other hand, advances in information and communication technology have supported the delivery of people's desires or aspirations more broadly and transparently. However, the rise of fake news and hate speech on social media can cause polarization and threaten unity in the nation and state. This research will discuss eradicating corruption in the digital era as well as the opportunities and challenges that will be undertaken in following it up. The aim of this research is to explore the challenges and opportunities in eradicating corruption in the digital era and the impact this has on the life of the nation and state. The method used in reviewing this research is a literature review of several articles contained in various information via the internet with search keywords for articles on eradicating corruption in the digital era, as well as challenges and opportunities for national and state life. The type of data used is secondary data, namely data obtained from library research which is the result of research and processing from other people which is available in the form of literature. This digital era has brought significant changes in various aspects of life, including efforts to eradicate corruption. Digital technology has the opportunity to increase effectiveness and efficiency in eradicating corruption, but it also presents new challenges that must be overcome.

Keyword: Corruption, Eradication, Digital Era, Challenges and Opportunities.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah yang telah berlangsung selama berabad - abad di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia.

Korupsi telah menjadi masalah serius yang telah lama mengancam kehidupan bangsa dan negara. Di era komputer dan internet saat ini, korupsi semakin mudah dilakukan dan menawarkan peluang baru untuk pemberantasan korupsi. Ada teknologi canggih yang memungkinkan pelaku korupsi dengan mudah menyembunyikan hasil korupsinya. Di sisi lain, teknologi digital juga dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Meskipun upaya terus - menerus untuk memberantas korupsi masih menghadapi banyak tantangan. Dunia maya membawa tantangan baru dan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan memperburuk kesejahteraan sosial. Upaya penting dalam membangun tatanan yang bersih dan transparan adalah pemberantasan korupsi. Di era digital, korupsi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti transmisi data pribadi, pencucian uang elektronik, kolusi melalui platform digital, dan suap online. Modus operandi baru yang perlu diwaspadai juga merupakan bagian dari masalah ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, teknologi digital menawarkan berbagai peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menangani korupsi secara menyeluruh.

Penyalahgunaan teknologi untuk melakukan korupsi dan penyebaran informasi palsu merupakan ancaman besar bagi upaya pemberantasan korupsi. Di era digital yang terus berkembang, pemberantasan korupsi semakin sulit, namun juga membuka jalan bagi inovasi dan perubahan yang baik. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di era digital, serta bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam penyusunan artikel ini, tinjauan literatur digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah korupsi di tengah kemajuan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur review dengan melakukan kajian dan menganalisis informasi dari beberapa sumber penelitian sebelumnya mengenai pemberantasan korupsi di era digital, serta tantangan dan peluang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian dilakukan dengan meninjau dari beberapa artikel jurnal dan sumber lain dari internet yang relevan untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai topik penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan merupakan hasil penelitian orang lain yang tersedia dalam bentuk literatur.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan penelitian literatur tentang tantangan dan peluang pemberantasan korupsi di era digital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan melakukan penelitian yang cermat dan menganalisis berbagai sumber literatur, artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah pemberantasan korupsi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital merupakan gerbang baru dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Kita memiliki tantangan dan peluang untuk memberantas korupsi melalui platform digital. Namun, era digital bagaikan pisau yang memiliki dua sisi. Di satu sisi memang memberikan peluang untuk memberantas korupsi agar lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, era digital ini bisa memberikan celah untuk praktik korupsi melalui teknologi yang lebih canggih. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pemberantasan korupsi di era digital, antara lain :

1. Administrasi Data dan Informasi

Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di era digital adalah pengelolaan data dan informasi yang baik. Karena era digital menghasilkan banyak data dan informasi, pemberantasan korupsi membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi supaya dapat membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi korupsi, pengelolaan yang baik sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Namun, data harus disimpan, diolah, dan disimpan dengan keamanan yang tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, pemberantasan korupsi di era digital memerlukan sistem informasi yang efisien dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi untuk pemberantasan korupsi di era digital :

a. Pengumpulan Data

Pemberantasan korupsi bergantung pada pengumpulan data yang representatif dan berkualitas tinggi. Ini termasuk data statistik, pengeluaran, pendanaan, pengelolaan hukum, dan data pengelolaan sosial. Pengumpulan data harus dilakukan secara transparan dan terintegrasi sehingga dapat digunakan untuk pemberantasan korupsi.

b. Pengolahan Data

Proses mengubah data mentah menjadi informasi berguna dan maksudnya disebut pengolahan data. Proses ini harus dilakukan dengan benar agar data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memerangi korupsi, dan menggunakan teknologi yang tepat, seperti cloud, big data, dan kecerdasan buatan.

c. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Hal ini harus dilakukan dengan benar dan efektif sehingga data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Pengelolaan data harus dilakukan dengan menggunakan sistem yang tepat, seperti sistem informasi pengelolaan hukum, sistem informasi pengelolaan sosial, dan sistem informasi penegakan hukum.

d. Pengendalian Data

Pengendalian data adalah proses mengatur dan mengelola data yang harus dikumpulkan. Hal ini harus dilakukan dengan benar dan efektif sehingga data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memerangi korupsi. Hal ini memerlukan penggunaan sistem informasi yang tepat, seperti sistem informasi pengelolaan hukum, sistem informasi pengelolaan sosial, dan sistem informasi pengelolaan informasi statistik.

2. Penggunaan Teknologi

Era digital menawarkan berbagai teknologi untuk digunakan dalam pemberantasan korupsi, tetapi pemberantasan korupsi di era digital memerlukan teknologi yang efektif, efisien, dan aman, seperti blockchain, AI, dan big data. Berikut ini adalah beberapa cara teknologi yang dapat digunakan untuk memerangi korupsi di era digital :

a. Penggunaan Blockchain

Blockchain dapat digunakan untuk secara efektif dan aman serta dapat digunakan untuk mengatur data dan transaksi. Di era digital, penggunaan teknologi blockchain memiliki potensi yang besar untuk memerangi korupsi. Blockchain dapat digunakan untuk membuat identitas digital yang aman dan terpercaya, sistem pelacakan anggaran yang transparan dan terbuka untuk semua orang, menyimpan data pemerintah yang sensitif, dan memudahkan proses audit publik. Selain itu, blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi transaksi sukuk, meningkatkan kepercayaan emiten dan investor, dan mengurangi resiko penipuan atau spekulasi.

Penggunaan blockchain dapat membantu memberantas korupsi di sektor publik dengan

membuat sistem pelacakan anggaran yang terbuka, membuat identitas digital yang aman, dan menyimpan data pemerintah yang sensitif. Selain itu, blockchain dapat membantu mengurangi kemungkinan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, penggunaan blockchain dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti peraturan yang tidak jelas, infrastruktur yang terbatas, dan kesulitan untuk memahami dan mengembangkan teknologi blockchain. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan dari semua pihak dan lebih banyak penelitian daripada penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

b. Penggunaan AI

AI dapat mengidentifikasi dan menganalisis data untuk mengidentifikasi dan menganalisis data, yang dapat membantu mendeteksi dan mengatasi korupsi. AI memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan dalam pemberantasan korupsi di era digital. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, AI dapat membantu mengidentifikasi pola - pola yang melibatkan korupsi dalam keuangan pemerintah. Selain itu, AI juga dapat memeriksa kepercayaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok dan menemukan pelanggaran hukum.

Penggunaan AI juga dapat membantu mengidentifikasi antikorupsi melalui mini game komputer, buku kasus korupsi, dan lain - lain. Selain itu, AI dapat digunakan untuk mengajarkan antikorupsi kepada semua orang, mulai dari anak - anak hingga tingkat lanjut. Namun, penggunaan AI dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk peraturan yang tidak jelas, infrastruktur yang terbatas, dan kesulitan untuk memahami dan mengembangkan teknologi AI. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mengatasi masalah ini, serta peningkatan penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan potensi AI dan mempercepat transformasi digital di Indonesia.

c. Penggunaan Big Data

Big data dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi yang dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Big data memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam pemberantasan korupsi di era digital. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah korupsi melalui transformasi digital, seperti mendigitalisasi semua dokumen pemerintahan dan menggunakan big data untuk menelusuri dan menjelaskan rekam jejak digital. Big data lebih efektif daripada manusia dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk menemukan pola yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan big data dapat membantu dalam mengajarkan antikorupsi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat lanjut.

3. Pengendalian Hukum

Pemberantasan korupsi di era digital memerlukan pengendalian hukum yang efektif dan terintegrasi. Namun, pemberantasan korupsi di era digital memerlukan pengendalian hukum yang tinggi, yang dapat menangani permasalahan yang berbeda dari era analog. Pengendalian hukum yang tinggi ini memerlukan pengendalian hukum yang dapat mengatasi masalah yang berbeda, seperti korupsi yang dilakukan oleh orang - orang yang melakukan tindakan korupsi yang tidak sah. Di era digital, pengendalian hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti memperkuat undang - undang dan pelaksanaannya merupakan salah satu caranya. Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2022, yang mengatur Neraca Komoditas, memungkinkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) Indonesia untuk menerbitkan berbagai macam Perizinan Ekspor (PE) dan Perizinan Ekspor Impor (PEI).

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan sumber daya dan memberikan pelatihan yang mampu kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, polisi, dan kejaksaan terkait ITE. Ini juga meningkatkan kemampuan penyelidikan, keuangan, analisis, dan penindakan dalam kasus korupsi. Di era teknologi saat ini, pemberantasan korupsi lebih mudah dilakukan jika masyarakatnya bermoral dan mampu mengetahui atau melaporkan segala jenis penyimpangan melalui sarana pengaduan yang terbuka. Korporasi juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi. Perusahaan harus meningkatkan kebijakan dan peraturan terkait di Indonesia serta upaya pencegahan korupsi yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan peran mereka dalam mencegah korupsi.

4. Pengendalian Rasionalisasi

Rasionalisasi sangat penting bagi pemberantasan korupsi di era digital karena korupsi terus meningkat dan semakin sulit untuk diatasi seiring perkembangan teknologi digital. Untuk berhasil dalam menghadapi tantangan era digitalisasi 5.0 dan media sosial, kepemimpinan yang dinamis dan mampu menggunakan teknologi secara optimal dapat menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi. Namun, pemimpin yang memahami konsep digitalisasi 5.0 dan mampu menggunakan teknologi digital dapat mempercepat penanganan korupsi dan membantu mengidentifikasi dan mengatasi praktik korupsi seperti pengolahan data dan pencucian uang. Media sosial juga memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, informasi yang tidak akurat atau terdistorsi dapat mempengaruhi dinamika politik dan mempercepat upaya penanganan korupsi.

Pemimpin harus tahu bagaimana mengakses dan menggunakan informasi digital untuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Untuk mencegah korupsi, pemerintah harus mengoptimalkan digitalisasi. Dengan demikian, setiap kemajuan digital akan meningkatkan kebutuhan untuk otomatisasi dan penggunaan sistem elektronik oleh seluruh layanan publik. Indonesia memiliki penggunaan teknologi digital yang sangat besar, sehingga dapat memenuhi persyaratan utama jika kita ingin mendorong digitalisasi semua layanan publik untuk mencegah korupsi. Generasi milenial, yang merupakan generasi yang paling terhubung dengan teknologi digital, memiliki pemahaman bahwa korupsi adalah fenomena yang harus diatasi. Untuk melawan korupsi, generasi milenial harus memulai dengan menanamkan rasa nasionalisme dan memberikan pendidikan antikorupsi melalui teknologi digital.

5. Pengendalian Sosial

Di era digital, pengendalian sosial yang efektif dan terintegrasi diperlukan untuk memberantas korupsi, yang dapat mengatasi berbagai masalah. Salah satu contohnya adalah korupsi yang dilakukan melalui media sosial. Pengendalian sosial di era digital dapat menyebarkan korupsi melalui berbagai upaya, seperti pemberantasan korupsi, mekanisme pengembalian aset, teknologi AI, pendidikan dan gerakan antikorupsi, dan lain-lain.

6. Pengawasan Politik

Dunia digital membawa perubahan politik, dan pemberantasan korupsi di era digital memerlukan pengendalian politik yang efektif dan terintegrasi. Namun, pengendalian politik yang dapat mengatasi berbagai masalah, seperti korupsi yang dilakukan oleh politikus, diperlukan untuk pemberantasan korupsi di era digital. Banyak strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan politik untuk memerangi korupsi di era teknologi. KPK dan pihak lain berupaya mengurangi kebencian masyarakat terhadap korupsi melalui edukasi dan advokasi. Di era digital, masyarakat memiliki kemampuan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan melalui sarana pengaduan yang terbuka. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat sistem yang

mudah dan bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran korupsi. Orang – orang yang bermoral dan menyadari risiko korupsi memiliki kemampuan untuk melaporkan segala jenis penyimpangan melalui pengaduan.

7. Pengendalian Kesehatan

Perubahan dalam kesehatan dibawa oleh era digital. Pemberantasan korupsi di era digital memerlukan pengendalian kesehatan yang efektif dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah, seperti korupsi yang dilakukan oleh dokter dan perusahaan farmasi. Pengendalian kesehatan untuk memberantas korupsi di era digital dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti menghilangkan manipulasi ruang dengan memanfaatkan big data dan teknologi digitalisasi, peningkatan pelayanan publik melalui koordinasi, pemantauan, preventif, dan bantuan transparansi dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam mendeteksi korupsi, penerapan mekanisme pelaporan korupsi yang mudah dan terjangkau, memanfaatkan transparansi data di sektor kesehatan untuk memperkuat ekosistem digital, dan lain sebagainya.

8. Pengendalian Keuangan

Perekonomian di era digital berubah, dan pemberantasan korupsi di era digital memerlukan pengendalian ekonomi yang efektif dan terintegrasi. Namun pengendalian ekonomi di era digital harus dapat mengatasi berbagai masalah korupsi, seperti korupsi yang dilakukan oleh investor dan perusahaan. Untuk menghilangkan korupsi di era digital, ada beberapa langkah penting yang harus diambil untuk mengendalikan keuangan seperti pencegahan dan literasi masyarakat, pelaporan kejahatan keuangan digital, upaya antikorupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kemampuan pengawasan, kolaborasi antar lembaga dan kementerian, dan lain – lain.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, era digital memiliki tantangan tersendiri untuk memberantas korupsi. Tantangan tersebut dapat teratasi apabila terdapat upaya dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan dukungan dari publik. Namun, era digital juga membuka peluang yang lebih besar dalam memberantas korupsi di Indonesia, antara lain :

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Di era digitalisasi ini, pemerintah dapat dengan mudah dalam membuka akses informasi ke publik secara luas. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggaran negara, pengadaan barang dan jasa, kinerja pemerintah secara online, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mempermudah masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi. Dengan mengembangkan sistem e-government secara efektif dapat mengurangi peluang korupsi. Sistem e-goverment ini sistem ini dapat membantu memastikan bahwa semua proses dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di Indonesia telah diimplementasikan dengan sistem e-procurement yang menunjukkan hasil positif dalam mengurangi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

2. Meningkatkan Partisipasi dalam Masyarakat

Teknologi digital dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam pemberantasan, pencegahan, dan penindakan korupsi, seperti melaporkan kasus korupsi melalui platform online dan crowdsourcing, mengawasi penggunaan anggaran publik, dan mengawasi kinerja pemerintah. Masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi melalui platform online atau aplikasi smartphone. Mereka juga dapat mengakses informasi tentang kinerja pemerintah dan anggaran negara melalui platform online atau aplikasi smartphone. Media sosial juga dapat digunakan untuk berkampanye dengan tema anti korupsi untuk mengedukasi publik. Edukasi dan literasi mengenai anti korupsi dapat

menjadi kunci utama untuk memberdayakan masyarakat.

3. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum

Penegak hukum di era digital harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dalam mencegah terjadinya korupsi. Dengan menganalisis data dan menggunakan kecerdasan buatan yang ada seperti AI, dapat membantu mengidentifikasi pola korupsi dan menganalisis data keuangan. Apabila antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan lainnya melakukan kolaborasi, maka hal tersebut akan membantu mempercepat dalam proses penyelesaian kasus korupsi dan dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat.

4. Kerjasama Internasional dalam Memberantas Korupsi

Dengan adanya era digital ini, kita dapat meningkatkan kolaborasi antar lembaga anti korupsi di Indonesia dan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan era digitalisasi dapat membantu dalam memperoleh informasi maupun berkoordinasi dalam penyelidikan untuk memberantas korupsi. Indonesia dapat berpartisipasi aktif di forum internasional yang membahas tentang pemberantasan korupsi serta mengikuti webinar dan workshop yang diselenggarakan untuk berbagi pengalaman dan praktik. Kedua hal tersebut sangat bermanfaat karena selain dapat mempelajari strategi dalam memberantas korupsi, kita juga bisa memperkuat kerjasama dan meningkatkan citra Indonesia di kanca internasional.

5. Memberikan Pendidikan dan Sosialisasi

Untuk mengubah budaya kerja dan mendorong pendidikan antikorupsi, Trisula Pemberantasan Korupsi KPK mengembangkan program yang disebut Sula Pendidikan untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi antikorupsi. Program ini dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan untuk mengubah budaya kerja dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi. Panduan Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi (PAK) dibuat oleh KPK. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mitra pendidikan dalam menerapkan PAK, sesuai dengan peraturan terkait Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi KPK memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Sula Pendidikan adalah strategi pencegahan yang dilengkapi dengan sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui Sula Pendidikan.

6. Mendorong Inovasi dan Teknologi Antikorupsi

Memanfaatkan teknologi digital secara kreatif dan bertanggung jawab memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Diharapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dan membawa manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi antikorupsi serta meningkatkan kapasitas dan literasi masyarakat digital. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak dan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan privasi individu. Membangun budaya antikorupsi yang kuat di seluruh sektor masyarakat sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi mereka dalam pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Korupsi telah menjadi masalah besar yang mengancam kehidupan bangsa dan negara selama bertahun – tahun. Di era digitalisasi, teknologi digital juga membantu memerangi korupsi. Sekarang ada teknologi yang memungkinkan orang yang melakukan korupsi dengan mudah menyembunyikan hasilnya. Korupsi mengganggu ekonomi dan

kesejahteraan sosial. Dalam pemberantasan korupsi teknologi digital menawarkan berbagai peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Di era digital yang terus berkembang, pemberantasan korupsi semakin sulit untuk dihadapi, namun juga membuka jalan bagi inovasi dan perubahan yang baik pula. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas tantangan dan peluang dalam pemberantasan korupsi di era digital, serta bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara keseluruhan. Dalam penyusunan artikel ini, literatur review digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah korupsi di tengah kemajuan teknologi digital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Era digital merupakan sebuah gerbang baru dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Di sisi lain, era digital juga bisa memberikan celah untuk praktik korupsi melalui teknologi yang lebih canggih. Sehingga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pemberantasan korupsi di era digital, pemberantasan korupsi membutuhkan data yang akurat dan terintegrasi untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi korupsi, pengelolaan yang baik sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Penggunaan teknologi di era digital menawarkan berbagai teknologi untuk digunakan dalam pemberantasan korupsi, seperti penggunaan blockchain sebagai sistem pelacakan anggaran yang transparan dan terbuka untuk semua orang, menyimpan data pemerintah yang sensitif, dan memudahkan proses audit publik. Tapi, penggunaan blockchain dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti peraturan yang tidak jelas, infrastruktur yang terbatas, dan kesulitan untuk memahami dan mengembangkan teknologi blockchain. Namun, dengan kontribusi dari segala pihak untuk menghadapi setiap tantangan yang kompleks, memanfaatkan peluang yang ada, dan mengambil langkah yang strategis dalam menghadapi korupsi di era digital, seharusnya bangsa Indonesia mampu untuk memerangi tindak pidana kasus korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I. (2016). Pengaruh efikasi diri dan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, 539-548. Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Indraprasta PGRI.
- Akman, I., Mishra, D., & Babb, J. S. (2018). "E-Government and Corruption: The Role of Digital Technologies." *Public Administration Quarterly*, 42(3), 491–524. (Menjelaskan peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi.)
- ANTARA News. (2017, November 9). Menhan: korupsi penyakit "kronis" yang harus diberantas. YouTube: Home. Retrieved April 18, 2024, from <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/12/14/menhan-korupsi-penyakit-kronis-yang-harus-diberantas.html>
- Astuti, D.P., Leonard, L., Bhakti, Y. B., & Astuti, I. A. D. (2019). Developing Adobe Flash-based mathematics learning media for 7th-grade students of junior high school. *Journal of Physics: Conf. Series* 1188 012098. <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1188/1/012098>.
- Atikah, N., Syafi'i, A., Rohimi, U. E., & Rani, P. (2023). Islamic Economic Position as a Breakfast to Reducing Inflation. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(1), 48-54.
- Avicena. (2022, November 13). Big Data Pengadaan Barang Jasa dan Pencegahan Korupsi. Lantang.ID. Retrieved April 19, 2024, from <https://lantang.id/bigdata-dan-pencegahan-korupsi/>
- Azmi, I. F., & Nugroho, A. A. (2023). Sistem anti-korupsi 4.0: Adopsi teknologi blockchain di sektor publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 9, No. 1, 93 - 108. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.985>
- Babbie, E. (2016). "The Practice of Social Research." Cengage Learning. (Membahas teknik studi

- kepastakaan dan analisis isi secara detail.)
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (btkp). (2017, November 9). Cegah Korupsi Era Digital. YouTube: Home. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.btkp.go.id/berita/read/34248/505/Cegah-Korupsi-Era-Digital>
- Baza, M. R. M., & Moh. Agil. (2023, Agustus). PERAN PENTING TEKNOLOGI DIGITAL BLOCKCHAIN DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS KORUPSI PENGGELAPAN SURAT BERHARGA. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 3, 43 - 54. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). "Qualitative Data Analysis with NVivo." Sage Publications. (Membahas penggunaan perangkat lunak analisis data NVivo dalam konteks analisis isi.)
- Berelson, B. (1952). "Content Analysis in Communication Research." Free Press. (Menyajikan dasar-dasar teoritis dan praktis dalam melakukan analisis isi pada penelitian komunikasi.)
- Bhatnagar, S. (2015). "E-Government and Anti-Corruption: A Case Study of India." In L. Lawton & H. I. Sørby (Eds.), *Combating Corruption and Fraud in the Public Sector* (pp. 137–155). Edward Elgar Publishing. (Menyajikan studi kasus tentang pengalaman India dalam menggunakan e-government untuk memerangi korupsi.)
- Budianto, V. A. (2022, April 12). Dasar Hukum KPK dan Kedudukannya dalam Pemberantasan Korupsi. *Hukumonline*. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/>
- Cheung, A., & Fung, I. (2016). "Can Digital Technologies Empower Civil Society Against Corruption? The Case of the Chinese New Citizens' Movement." *Public Administration and Development*, 36(1), 21–33. (Mempertimbangkan peran teknologi digital dalam memberdayakan masyarakat sipil untuk melawan korupsi, berdasarkan studi kasus gerakan warga baru di Tiongkok.)
- Cooper, H. M. (2016). "Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach." Sage Publications. (Memberikan panduan langkah-demi-langkah dalam melakukan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur.)
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches." Sage Publications. (Memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan penelitian, termasuk analisis isi.)
- Darmawan, H. (2016). Pembelajaran berbasis konstruktivisme menggunakan media animasi dengan kerangka kerja TPCK dan gaya belajar terhadap prestasi belajar siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(1): 1-11. <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v6i1.747>.
- Deri Dahuri. (2023, May 11). Teknologi Blockchain Bisa Bantu Berantas Korupsi di Indonesia. *Media Indonesia*. Retrieved April 20, 2024, from <https://mediaindonesia.com/teknologi/580518/teknologi-blockchain-bisa-bantu-berantas-korupsi-di-indonesia>
- Efrani Paretanan, Winda Darwis, Lukas Barung, D. U., Putri, N. L., Intan Resa, & Merianti Rome. (2021). PERAN TEKNOLOGI BERBASIS GADGET DALAM MEMBERANTAS KORUPSI. <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/PROSDING/article/download/1561/1140/4932>
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). "The Qualitative Content Analysis Process." *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. (Menyajikan panduan praktis tentang proses analisis isi dalam penelitian kualitatif.)
- Fajriyah & Supardi. (2015). Penerapan strategi pembelajaran metakognitif terhadap hasil belajar matematika. In Leonard (Editor). *EduResearch: Raise The Standard*, Vol. 1, 1-24. Jakarta: Unindra Press.
- Fitriani, R. N., & Hakim, A. R. (2022). Peran Pramuka dalam Menanamkan Nilai Cinta Tanah Air di MIS Al-Istiqomah Cibingbin. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1), 36-50.
- Fransisco, W. (2020). PIMPINAN KOMISI PEMBRANTASAN KORUPSI DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KORUPSI DI ERA 4.0. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 36-53.
- Gaurav, K., & Chakrabarti, A. (2016). "ICT, Corruption, and Government Services: A Cross-

- Country Analysis." *Information Technology for Development*, 22(3), 442–463. (Melakukan analisis lintas negara tentang hubungan antara teknologi informasi, pelayanan pemerintah, dan tingkat korupsi.)
- Hakim, A. R. (2019). Evaluasi Program Pembelajaran Tahfidzul Quran Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Di Sdit Alfalah Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(3), 39-58.
- Hakim, A. R. (2022). Islamic Religious Education Strategy in Instilling Character Moral Values in Adolescents. *International Journal of Social Health*, 1(2), 64-68.
- Heeks, R. (2017). "ICTs and Anti-Corruption: Theory and Overview." *Development Informatics Working Paper Series*, 68. (Mengulas teori dan pandangan umum tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberantasan korupsi.)
- Idat, D. G., Nurdika, M. N., Berlian Helmy, Rheza Firmansyah, Andi Bidihsyah, Fahmi Irhamsyah, & Saraswati, N. M. V. (2019, June 18). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) Guna. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, (38). Retrieved April 18, 2024, from https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_38_Juni_2019.pdf
- Jia Xin, R. C. (2023, May 30). Manfaatkan Teknologi Digital untuk Kenalkan Nilai Antikorupsi. ACLC KPK. Retrieved April 18, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20230530-manfaatkan-teknologi-digital-untuk-kenalkan-nilai-antikorupsi>
- Jufri Galaento. (2023). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL SKRIPSI. Repository UNSIMAR. Retrieved April 19, 2024, from https://repository.unsimar.ac.id/1792/1/Bab_1_dp.pdf
- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2022, February 10). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Retrieved April 19, 2024, from https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1173/pentingnya-pemanfaatan-big-data-dalam-memerangi-pencucian-uang.html
- Kominfo. (2022, August 4). Pemerintah Optimalkan Digitalisasi untuk Pencegahan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.batubarakab.go.id/post/pemerintah-optimalkan-digitalisasi-untuk-pencegahan-korupsi>
- Kominfo. (2024, January 18). Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/54224/lewat-digitalisasi-pemerintah-perkuat-pengawasan-dan-berantas-korupsi/0/berita>
- KPK. (2017, November 9). Cegah Korupsi dengan Keterbukaan Data di Sektor Kesehatan. YouTube: Home. Retrieved April 20, 2024, from <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2326-cegah-korupsi-dengan-keterbukaan-data-di-sektor-kesehatan>
- KPK. (2022, May 11). Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi. ACLC KPK. Retrieved April 20, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- KPK. (2024, February 5). KPK Ajak Pelajar SMA Bangun Karakter Antikorupsi Sejak Dini. KPK. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3360-kpk-ajak-pelajar-sma-bangun-karakter-antikorupsi-sejak-dini>
- Krippendorff, K. (2018). "Content Analysis: An Introduction to Its Methodology." Sage Publications. (Menyajikan konsep dan teknik analisis isi yang komprehensif.)
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). (2020, July 29). Agus Widjojo: Generasi Milenial Anti Korupsi Perlu Diawali Dengan Menumbuhkan Semangat Kebangsaan. Lemhannas RI. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/896-agus-widjojo-generasi->

- milenial-anti-korupsi-perlu-diawali-dengan-menumbuhkan-semangat-kebangsaan
 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). (2023, February 1). Tiga Upaya Pemerintah dalam Penanganan Korupsi. Lemhannas RI. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1826-tiga-upaya-pemerintah-dalam-penanganan-korupsi>
- Leonard. (2013). Peran kemampuan berpikir lateral dan positif terhadap prestasi belajar evaluasi pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 32(1): 54-63. <http://dx.doi.org/10.21831/cp.v5i1.1259>
- Madya, S. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.
- Makalao, D. A. M., & Soeratin, H. Z. (2023, Juni 25). Peran Kepemimpinan Dalam Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media. *Journal of Islamic Education Leadership*, Volume 3 Nomor 1, 1 - 50. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jmpi/article/download/581/455>
- Manerep Pasaribu. (2023, March 8). Memberantas dan Mencegah Korupsi Lewat Transformasi Digital. *Kompas.id*. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/08/memberantas-dan-mencegah-korupsi-lewat-transformasi-digital>
- Mayring, P. (2000). "Qualitative Content Analysis." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(2). (Menyajikan konsep dan langkah-langkah praktis dalam melakukan analisis isi pada penelitian kualitatif.)
- Méndez, F., Sepúlveda, M., & Trejo, G. (2017). "Corruption and the Use of Information Technologies: Evidence from a Randomized Experiment in Mexico." *Journal of Public Economics*, 148, 14–21. (Menyajikan bukti empiris tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi memengaruhi tingkat korupsi berdasarkan eksperimen di Meksiko.)
- Miswanti, M., Awaliah, N. S., Saied, M., Atikah, N., & Nabila, M. (2022). Determinan Yang Berhubungan Dengan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (Ispa) Pada Balita Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp) Sanggamara Kodim 0101/Bs Kesdam Iskandar Muda Kota Banda Aceh Tahun 2021. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(7), 791-807.
- Mohamad Risbiyantoro. (2005). PERANAN MAHASISWA DALAM MEMERANGI KORUPSI. *BPKP*. Retrieved April 19, 2024, from https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasisw a.pdf
- Muhajir. (2017, November 9). Update dan Validasi Data Menjadi Pedoman dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. YouTube: Home. Retrieved April 20, 2024, from <https://dinkes.gorontaloprov.go.id/update-dan-validasi-data-menjadi-pedoman-dalam-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-penyakit-menular/>
- Nabila, M. (2020). Application for Selling Cuisine at Padang X Restaurant Based on Web. *Journal of Business Social and Technology*, 1(2), 97-113.
- Nasar, M. F. (2023, July 28). Membumikan Gerakan Antikorupsi dan “Paku Integritas”. Kementerian Agama RI. Retrieved April 19, 2024, from <https://kemenag.go.id/kolom/membumikan-gerakan-antikorupsi-dan-paku-integritas-YlnFY>
- Neuman, W. L. (2014). "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." Pearson. (Menguraikan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, termasuk studi kepustakaan dan analisis isi.)
- Niken Ariati. (2023, August 4). Digitalisasi Stranas PK Berantas Korupsi. ACLC KPK. Retrieved April 18, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20230804-digitalisasi-stranas-pk-berantas-korupsi>
- Nunung, A., & Hakim, A. R. (2020). Fungsi Pembagian Kerja Dalam Usaha Memperlancar Kerja Pegawai Pada Sub Bagian Tata Usaha Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(04), 1-13.
- Omar, M. A., Qureshi, M. I., & Yasin, M. M. (2019). "Impact of E-Government on Anti-Corruption: Evidence from Developing Countries." *Information Systems Management*, 36(4), 296–312. (Menyajikan bukti empiris tentang dampak penerapan e-government terhadap upaya pemberantasan korupsi, berdasarkan pengalaman negara-negara berkembang.)

- PPATK. (2020, January 22). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.ppatk.go.id/news/read/1025/tantangan-di-era-digital-perlu-diwaspadai.html>
- Prahmana, R.C.I. (2012). Pendesainan Pembelajaran Operasi Bilangan Menggunakan Permainan Tradisional Tepuk Bergambar untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar (SD). Unpublished Thesis. Palembang: Sriwijaya University.
- Ratnasari, N., & Hakim, A. R. (2022). The Effect Of Differentiation Strategy On Consumer Loyalty In Ud Trans Jaya Kasokandel Majalengka District. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3).
- Rizkinaswara, L. (2023, August 22). Upaya Pencegahan dan Literasi Pegang Peran Penting Hadapi Kejahatan Keuangan Digital. Ditjen Aptika. Retrieved April 20, 2024, from <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/upaya-pencegahan-dan-literasi-pegang-peranan-penting-hadapi-kejahatan-keuangan-digital/>
- Roja Firmansyah. (2023, Desember 20). Peran Kecerdasan Buatan Dalam Pemberantasan Korupsi? *Jurnal SUMBAR*. <https://jurnalsumbar.com/2023/12/peran-kecerdasan-buatan-dalam-pemberantasan-korupsi/>
- Saputro, J. S. (2023, Desember 01). Peringatan Hakordia 2023, Korupsi Adalah Parasit Masyarakat dan Negara. *Djkn.kemenkeu.go.id*. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16641/Peringatan-Hakordia-2023-Korupsi-Adalah-Parasit-Masyarakat-dan-Negara.html>
- Situmeang, S. M. T. (2021, Maret 23). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, Volume 27 Nomor 1, 38 - 52. [10.47268/sasi.v27i1.394](https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394)
- Sulaeman, S., Hakim, A. R., Syahman, M., Ruspandi, T., & Yoyoh, Y. (2021). Implementasi Komunikasi Model Penta Helix untuk Meningkatkan Pendidikan Agama Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 224-234.
- Suryawijaya, T. W. E. (2023, Mei 31). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 55 - 67. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Susanti, D. S., Nadia Sarah, & Nurindah Hilimi. (2018, Desember). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *INTEGRITAS*, Volume 4 Nomor 2, 207 - 232. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/222/60/883>
- Syafii, A., Rohimi, U. E., Shobichah, S., Atikah, N., & Rani, P. (2023). Broadcasting Communications in Encouraging Public Participation in Elections. *Journal of World Science*, 2(4), 571-575.
- Tanjung, A. F., Patma Wati, & Nurlaila. (2023). PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM AKUNTANSI SYARIAH. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 8, No. 2, 1218 - 1227. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19282>
- Verni, A. (2022, August 19). Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya. *Gramedia*. Retrieved April 19, 2024, from <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/>
- Verni, A., & Veronika, N. (2022, August 19). Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya. *Gramedia*. Retrieved April 20, 2024, from <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/>
- Wahono, R. S. (2023, September 29). Teknologi AI dan Pemberantasan Korupsi. *ACLK KPK*. Retrieved April 19, 2024, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20230929-teknologi-ai-dan-pemberantasan-korupsi>
- Wawan Fransisco. (2020, Mei 01). PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DI ERA 4.0. Volume 18 Nomor 2, 229 - 250. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/287/247>
- Weber, R. P. (1990). "Basic Content Analysis." Sage Publications. (Memberikan panduan lengkap tentang konsep dan teknik analisis isi untuk penelitian sosial.)

- Wei, Q., & Lv, J. (2016). "The Impact of E-Government on Combating Corruption: Evidence from China." *Government Information Quarterly*, 33(4), 651–657. (Mengulas dampak dari penerapan e-government dalam pemberantasan korupsi, berdasarkan bukti empiris dari China.)
- Wijaya, A. S. (2019). Manajemen Rancang Bangun Website Berbasis Database Di Desa Tuk Kecamatan Kedawung. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 1(2), 70-77.
- Wijaya, A. S., Umam, A. F., Hakim, A. R., & Nabila, M. (2022). Web Based Sales Information System at Greenvest Source. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(11), 3977-3993.
- Yek, F. C. (2023, April 14). Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retrieved April 20, 2024, from <https://cabdindikwilayah5.babelprov.go.id/content/bijak-menggunakan-teknologi-di-era-digital>
- Zulkardi. (2002). *Developing A Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers*. Published Dissertation. Enschede: University of Twente.